

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ZAKAT
INVESTASI SUKUK**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**RIMBA KURNIA SARI
NPM :1621030099**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ZAKAT
INVESTASI SUKUK**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**RIMBA KURNIA SARI
NPM : 1621030099**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Harta merupakan sarana media yang jika digunakan dalam kebaikan maka ia akan menjadi baik. Dan jika digunakan dalam keburukan, maka ia akan menjadi buruk. Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Islam juga melarang umatnya menumpuk uang atau kekayaan, karena Islam tidak membenarkan umatnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Dalam hukum Islam, membayar zakat ialah suatu kewajiban seorang muslim, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal (harta). Kemudian dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah diatur apa saja harta yang wajib dizakati salah satunya adalah surat berharga dalam hal ini investasi berupa sukuk. Permasalahan ini dapat dilihat dari dua segi hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah: (1). bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk? (2). bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*), kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir deduktif, setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa dalam Islam Investasi sangat dianjurkan. Investasi sukuk bisa menjadi pilihan karena bebas dari *riba*, *maysir* dan *gharar*. Hukum zakat untuk investasi sukuk ialah wajib bagi mereka yang mengeluarkan uangnya untuk membeli sukuk. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 pasal 4 ayat (2) tentang pengelolaan zakat bahwa yang termasuk harta yang wajib dizakati ialah salah satunya surat berharga (sukuk). Persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk terlihat adanya perintah di dalam al-Quran, hadist dan perundang-undangan mengenai mengeluarkan zakat sukuk. Perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk yaitu di dalam hukum Islam jelas berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat, kadar untuk zakat sukuk dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%, tetapi dalam hukum positif tidak dijelaskan berapa besarnya kadar yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Rimba Kurnia Sari

NPM : 1621030099

Jurusan/Prodi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Zakat Investasi Sukuk” adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Juli 2020

Penulis,



Rimba Kurnia Sari
NPM 1621030099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG ZAKAT INVESTASI SUKUK**

Nama : **Rimba Kurnia Sari**

Npm : **1621030099**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I



Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II



Muslim, S.H.I., M.H.I

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah



Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ZAKAT INVESTASI SUKUK”** disusun oleh **Rimba Kurnia Sari**, NPM **1621030099**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin 31 Agustus 2020**

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

(.....)

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

(.....)

Penguji III : Muslim, M.H.I

(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Najruddin Tahmid, M.H

NIP. 196210221993031002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

(Qs. at-Taubah (9):103)



PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmanirrahim

Dengan rasa syukur kepada Allah Swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

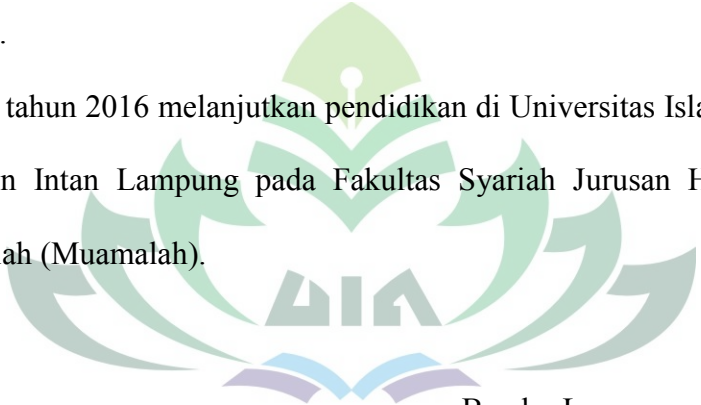
1. Yang tercinta, Bapak Ismanto dan Ibunda Lien Haenaswari yang telah membesarkanku, membimbing dan senantiasa selalu berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangan sepanjang hidup.
2. Kakakku Ahmad Agum Gumelar, Sariah dan Genta Dwi Fajar Kharisma yang selalu mendukung dalam pendidikanku.
3. Pamanku Untung Abadi dan seluruh keluarga tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Rimba Kurnia Sari di lahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 01 Juni 1998. Anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Efendi dan Ibu Pujiati (Alm). Penulis mulai menempuh pendidikan formal di mulai:

1. MIN 1 Teluk Betung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. SMP Tamansiswa Teluk Betung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



Bandar Lampung, 31 Agustus 2020
Penulis,

Rimba Kurnia Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang penuh dengan kekhilafan dalam bertindak dan berfikir. Sholawat dan salam diutarakan kepada Nabi Muhammad Saw beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Semoga di hari akhir kelak kita semua sebagai umatnya mendapatkan siraman syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Terucap rasa syukur yang teramat karena penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Zakat Investasi Sukuk” dengan lancar tanpa memiliki kesulitan yang berarti.

Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa adanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khairuddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Sahabat seperjuanganku Jurusan Muamalah angkatan 2016 kelas G yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas canda, tawa, tangis, duka, bahagia, dukungan dan kebersamaan yang kita lewati selama ini.
7. Sahabat-sahabatku, Ratna Septiana, Amelia Eraswati, Eva Dara Puspitasari, Dian Yunita, Annisa Fauzia, Priski Kurniasari, Windy Alifia, yang selalu ada, yang selalu berjuang bersama-sama dan yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan KKN kelompok 124 Desa Talang Padang. Terima kasih sudah berjuang bersama dalam membangun desa yang lebih bersih, indah serta membantu dalam melakukan kegiatan selama 40 hari.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf dan karyawan yang memberikan pelayanan dengan baik.
10. Semua pihak dari dalam maupun dari luar yang telah memberikan dukungannya, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

Semoga semua amal dan kebbaikannya akan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin yarobbal'amin.

Wassalamu'alaikum wr wb

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
LAMPIRAN.....	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Zakat	
1. Pengertian Zakat	14
2. Dasar Hukum Zakat.	17
3. Syarat Wajib Zakat	20
4. Macam-Macam Zakat.....	21
5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	26
6. Harta yang wajib dizakati	30

7. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat.....	36
B. Investasi Sukuk	
1. Pengertian Investasi.....	42
2. Dasar Hukum Investasi.....	46
3. Pengertian Sukuk.....	47
4. Dasar Hukum Sukuk.....	53
5. Macam-macam Sukuk.....	55
6. Keuntungan Sukuk	61
7. Karakteristik Sukuk.....	62
C. Tinjauan Pustaka	
 BAB III: HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ZAKAT	
INVESTASI SUKUK	
A. Zakat Investasi Sukuk Menurut Hukum Islam	66
B. Zakat Investasi Sukuk Menurut Hukum Positif.....	71
 BAB IV: ANALISIS	
A. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Zakat Investasi Sukuk.....	74
B. Persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang Zakat Investasi Sukuk.....	77
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah dalam judul tersebut. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Zakat Investasi Sukuk**” berikut istilah yang akan di bahas ialah:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.²

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara, sedangkan hukum positif menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang berlaku sekarang baik tertulis maupun tidak tertulis bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah.³

Zakat menurut Bahasa berarti tumbuh atau suci. Sedangkan menurut Bahasa Syara’ adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada

¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm.59

²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm.60

³C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm.73

yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.⁴

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.⁵

Sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab 'sak' atau sertifikat. Secara singkat, *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami bahwa skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk menganalisis lebih dalam mengenai zakat investasi sukuk dipandang dari hukum Islam dan hukum positif.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “**Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Zakat Investasi Sukuk**” ini yaitu:

⁴Labib Mz, *Fiqh Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm.356

⁵Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003), hlm.32

⁶Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm.265

1. Secara objektif

- a. Mengingat bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang diatur baik dalam al-Qur'an, hadist, dengan ketentuan memenuhi nishab dan haul.
- b. Untuk mengetahui hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk.

2. Secara subyektif

Ditinjau dari aspek yang dibahas, kajian judul ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya literatur dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

C. Latar Belakang

Undang-undang sebagai payung hukum dan sumber hukum di Indonesia memiliki kedudukan tinggi yang bersifat mengikat dari segi perintah sekaligus sanksi. Tonggak hukum positif di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya undang-undang. Menurut Prof Mahfud MD ketua MK, Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler maupun negara komunis, tetapi bukan juga negara yang bukan-bukan, melainkan Indonesia adalah negara hukum. Formalitas hukum selevel undang-undang atau Keppres/Perpres sebagai landasan hukum yang kuat. Terbitnya undang-undang otomatis menuntut diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan

Keputusan Menteri/Peraturan Menteri. Undang-undang menjadi sumber hukum dan rujukan bagi peraturan di bawahnya semisal peraturan daerah.

Jika disadari, tanpa harus ada formalisasi hukum selevel Undang-undang atau Peraturan dibawahnya, keberadaan sumber hukum syariah al-Quran dan Hadist sangat mencukupi sebagai dasar hukum. Bahkan fatwa (MUI, Ormas, Kejamaahan) yang merupakan wujud formalisasi fiqh jika dapat menjadi sumber hukum, keberadaan bisnis syariah di Indonesia telah memiliki infrastruktur hukum yang kuat. Namun, karena struktur dan kultur hukum di Indonesia maka keberadaan dan kedudukan fatwa bersifat “himbauan” yang tentunya tidak mengikat perintah dan sanksi. Berbeda dengan negara-negara muslim di Timur Tengah, fatwa bisa menjadi sumber hukum positif yang mengikat dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi.

Fatwa di Indonesia dapat menjadi alternatif hukum positif, maka infrastruktur hukum bisnis syariah di Indonesia seharusnya mengalami perkembangan yang pesat. Sampai saat ini dewan syariah nasional (DSN) MUI sebagai representasi lembaga yang punya otoritas mengeluarkan fatwa mulai tahun 2000 telah menerbitkan lebih dari 60 fatwa terkait bisnis syariah.⁷

Di Era modern sekarang hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV, atau koperasi.

⁷Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Solo: Aqwam Media Profetika, 2011), hlm.49

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas–komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antarnegara dalam bentuk ekspor-impor.

Perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk–produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang–orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam–macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat–alat kosmetika dan obat–obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga bahan bangunan dan lain sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya).⁸

Pilihan investasi tidak hanya di perbankan saja, tetapi juga di asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank lain. Argumen ini juga tidak salah. Tetapi yang juga perlu diketahui di Indonesia, pilihan investasi yang

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.99

paling dominan adalah investasi di bank. Pasar modal memang menjadi pilihan investasi.

Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dalam memperkuat kondisi keuangannya. Investasi di pasar modal membutuhkan *knowledge* dan *skill* yang lebih dibandingkan bank.

Setiap investasi berada di antara dua pilihan, yaitu investasi yang aman (meskipun untung tidak terlalu besar) dan atau investasi yang menguntungkan. Prinsipnya investor aman dan harus untung. Nah, apakah bank syariah mampu menjadi salah satu pilihan investasi di atas. Persepsi masyarakat (investor) awam bahwa bank syariah ada bagi untung dan bagi rugi. Persepsi di atas lebih didominasi oleh persepsi jika rugi, maka berarti ikut menanggung rugi. Sehingga hambatan pertama bank syariah adalah melawan persepsi yang lebih cenderung mengedepankan pikiran jika merugi.

Kegiatan di pasar modal syariah berkaitan dengan perdagangan surat berharga (efek syariah) yang telah di tawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah (sukuk).⁹

Praktik sukuk secara umum diidentikkan sebagai “obligasi” yang penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk merupakan surat

⁹Burhanudiin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.131

pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan, seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *ishtishna*, dan *ijarah*.¹⁰ Dari ketiga hal tersebut, sukuk termasuk kedalam perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Surat berharga telah menjadi instrument yang penting dalam perekonomian modern dan telah menjadi sarana investasi yang kompetitif. Meniadakan sama sekali surat berharga seperti tidak mungkin. Surat berharga juga menjadi aspek penting yang patut dikaji dan diimplementasi menurut syariah.

Harta adalah asset. Atas dasar itu maka setiap aset individu atau perusahaan merupakan objek zakat yang potensial. Prinsip zakat adalah alokasi dan distribusi. Dengan zakat maka akan ada distribusi asset. Jika aset tersebut produktif maka bagian zakatnya adalah hasil produktivitas aset setelah melampaui nishab dan haul. Oleh karena itu, zakat mendorong produktivitas aset.

Ibadah zakat dapat mendidik orang untuk membersihkan jiwanya dari sifat kikir, tamak, sombong dan angkuh, karena kekayaannya dan membutuhkan sifat perhatian dan peduli terhadap orang yang lemah dan miskin. Sadari atau tidak kita sadari bahwa harta yang kita miliki itu adalah

¹⁰*Ibid*, hlm.141.

titipan Allah swt, oleh karena itu ada hak-hak orang lain yang wajib kita keluarkan.¹¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹²

Potensi zakat cukup besar dan selalu berbanding lurus tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain umat Islam pada umumnya baru mengenal menunaikan zakat fitrah, sementara zakat harta masih sangat sedikit yang memahami dan menyadarinya sebagai kewajiban, khususnya bagi mereka yang (pemilik harta) yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syariat Islam (nishab dan haul).¹³

Dapat disimpulkan penulis ingin mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk.

D. Fokus Penelitian

Sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan

¹¹Muhammad Ali, *Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm.60

¹²Al-Qur'an & Terjemahan, Qs. at-Taubah (9): 103

¹³Gasmir Bahmid, *Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm.5

penelitian.¹⁴ Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah menganalisis zakat investasi sukuk menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif mengatur zakat investasi sukuk?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang zakat investasi sukuk.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif zakat investasi sukuk.

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁵

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian tentang **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Zakat Investasi Sukuk”** dapat bermanfaat atau berguna baik secara praktis maupun teoritis.

¹⁴Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negerti Raden Intan Lampung, 2015), hlm.95

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo, 2015), hlm.109

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai zakat investasi sukuk menurut hukum Islam dan hukum Positif.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁶

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

¹⁶Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006), hlm.35

¹⁷Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm.8

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komperatif, yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan secara sistematis baik itu persamaan atau perbedaan tentang benda-benda, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide. Deskriptif yang dimaksud yaitu setelah semua data terkumpul, maka akan dijelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami dengan jelas.

2. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yakni bahan utama dalam penelitian. Bahan hukum primer meliputi al-Quran, hadist, undang-undang, fatwa Dewan Syariah Nasional.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer. Dalam hal ini buku-buku atau artikel-artikel serta skripsi-skripsi terdahulu dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus, jurnal, blog dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan.¹⁸ Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan primer yakni yang membahas mengenai zakat investasi sukuk menurut hukum Islam dan hukum positif dan buku-buku lainnya yang membahas tentang zakat, investasi, sukuk, diikuti data-data dari buku-buku sekunder yang menjelaskan dan berkaitan dengan zakat investasi sukuk.

4. Metode Pengolahan Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti.¹⁹

¹⁸Lexy Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.280

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm.48

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penulis juga menggunakan metode komparatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan secara sistematis dan terus-menerus sehingga diperoleh kesimpulan. Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang, dan prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²⁰ Cara berfikir komparatif dalam penelitian ini membandingkan data-data yang terkumpul dari hasil penelitian tentang persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.114

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu itu dengan syarat-syarat tertentu pula.²¹

Zakat menurut Bahasa berarti tumbuh atau suci. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

²¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*..., hlm.38.

Hubungan antara pengertian zakat menurut Bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.²² Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”²³

Dalam syariat disebutkan zakat karena adanya pengertian etimologis. Yaitu karena zakat dalam membagikan pelakunya dari dosa dan menundukkan kebenaran imannya. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ke tiga, hukumnya *fardhu a'in* bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya.²⁴ Menurut hadist, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.²⁵

²²Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm.7.

²³Al-Qur'an & Terjemahan, Qs. at-Taubah (9): 103

²⁴Labib Mz, *Fiqh Islam* ..., hlm.356.

²⁵Mohammad Daud Ali, *Ibid*, hlm.39

Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial-ekonomi Islam. Dalam al-Qur'an, perintah sholat juga seringkali diikuti dengan perintah zakat. Hal ini secara jelas menyiratkan betapa pentingnya zakat yang berdimensi sosial-horizontal (*habluminannas*) yang disertakan dengan shalat yang berdimensi trasedental-vertikal (*habluminallah*).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 ayat (1), zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sehingga bagi seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan diri dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan menjadikan hartanya berkah bagi dirinya, keluarga dan orang di sekitarnya. Bukan hanya harta yang banyak yang didapat namun harta yang terus-menerus tumbuh dan berkembang dalam kebaikan yang dimaksud dengan berkah, baik dari sumber maupun hasilnya²⁶

Zakat merupakan ketentuan yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT memiliki hikmah yang begitu penting. Zakat di dalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan antar umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik,

²⁶Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.140

dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim.

a. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum disyariatkannya zakat yang termuat dalam al-Qur'an yaitu diantaranya:

Qs. al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”²⁸

Tafsir dari ayat diatas adalah ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan tali silaturahmi, tentulah kamu akan mendapatinya maksudnya pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat

²⁷Indonesia Zakat dan Development Report, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2011), hlm.97

²⁸Al-Qur'an & Terjemahan, Qs. al-Baqarah (2): 110

akan apa-apa yang kamu kerjakan sehingga kamu akan menerima balasan dari padanya.²⁹

b. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فِتْرَةً فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه ابن عباس)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw mengutus mua’dz ke negeri Yaman, lalu Rasulullah saw menuturkan sabdanya yang didalamnya terdapat ucapan: sesungguhnya Allah telah mewajibkan (memfardhukan) atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir. (HR. Ibnu Abbas)³⁰

Dasar hukum zakat pun diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- 1) Pasal 1 dan Pasal 2 menjelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

²⁹Imam Jalaluddin Al-Mahaili, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm.58

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008, hlm.22.

- 2) Pasal 7 menjelaskan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.
- 3) Pasal 4 ayat 2 yakni harta yang dikenai zakat meliputi:
 - a) Emas, perak dan logam mulia lainnya
 - b) Uang dan surat-surat berharga lainnya
 - c) Perniagaan
 - d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
 - e) Peternakan dan perikanan
 - f) Pertambangan
 - g) Perindustrian
 - h) Pendapatan dan jasa
 - i) Rikaz³¹

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat ini sangat berperan dalam pengembangan organisasi pengelola zakat atau lembaga zakat di Indonesia, karena Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat (OPZ), serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ).

³¹Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3. Syarat Wajib Zakat

- a. Islam, zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat kita pahami dari kewajiban secara berurutan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya menjadi wali di Yaman.
- b. Baligh, para ulama berbeda pendapat pada anak yang belum baligh yang memiliki harta wajib zakat. Wajibkah ia membayar zakat? Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum baligh untuk membayar zakat.
- c. Merdeka, kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah swt yang sangat besar. Dengan itu, seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dan dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah swt membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.
- d. Mencapai Nishab, maksudnya jika seseorang mempunyai harta yang mencapai nishab yang sudah ditentukan oleh hukum Islam dan kadarnya berbeda satu sama lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Apabila harta seseorang tidak mencapai nishab maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.³²

³²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm.13-15.

4. Macam-Macam Zakat

Zakat merupakan ibadah *Maliyah* atau harta yang hukumnya wajib, hukum zakat yang wajib menjadikan syariat zakat memiliki ketentuan tertentu. Jika pelaksanaan zakat dilakukan tanpa ketentuan zakat, nilai zakat akan menjadi gugur. Dengan demikian, maka amalannya menjadi sedekah atau infaq.

Zakat dapat kita sebut juga sebagai rukun masyarakat karena berhubungan langsung dengan masyarakat (*ta'abuddi* / sosial). Berbeda dengan rukun Islam lainnya yang menyangkut pada kehidupan pribadi, seperti syahadat, shalat, puasa, dan haji (*ta'aqulli* / pribadi). Rukun Islam yang menyangkut pribadi maka pahala nya pun untuk pribadi. Sementara itu, zakat sebagai salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan banyak orang. Dengan demikian, tidak salah jika kita menganggap zakat sebagai rukun masyarakat.

Banyak orang yang terlibat dalam keberhasilan urusan zakat, misalnya amil sebagai pengelola. Jika amil amanah, professional, dan inovatif, insya Allah zakat menjadi berkah. Donatur pun akan bertambah. Sebaliknya jika amil khianat, *mustahik* akan menderita. Dampak dari zakat yang tidak dikelola dengan baik sangat besar, dana yang dihimpun akan sia-sia, *mustahik* terdzalimi dan makin prustasi, sedangkan kekecewaan *muzakki* membuat ketidakpercayaan masyarakat meningkat. Secara tradisional, zakat terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat

menjelang hari raya idul fitri. Zakat mal adalah zakat atas kekayaan yang meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, hasil kerja atau zakat profesi, zakat hadiah, zakat perusahaan, dan zakat obligasi atau saham.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut Bahasa adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan menurut syara' adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan berkeluarga di hari raya Idul Fitri.³³

b. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Hukum mengeluarkan zakat ini wajib 'ain, bagi mereka yang memiliki harta yang sudah mencapai nishab. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap orang Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nishab ini sama halnya kewajiban

³³ Labib Mz, *Ibid*, hlm.357.

melaksanakan shalat fardhu. Karena keduanya merupakan salah satu rukun Islam. Karena itu orang yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat, tetapi tidak mau mengeluarkannya, maka ia tergolong orang musyrik. Untuk zakat mal terdapat jenis kekayaan yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1) Zakat emas dan perak serta perhiasan.

Adapun jumlah besar harta yang di keluarkan adalah untuk emas jika telah mencapai emas 20 dinar 93,6 gr dan peternak jika telah mencapai 200 dinar 624 gr.

2) Zakat pertanian

Para *fuqaha* sepakat atas kewajiban zakat hasil pertanian. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam jenis tanaman dan buah apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat hasil pertanian hanya pada kurma, padi, gandum, biji-bijian, dan anggur. Akan tetapi, mereka tidak bersepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman yang bukan menjadi tanaman pokok, seperti jahe, kunyit, buah-buahan selain anggur dan kurma, sayur-sayuran.

3) Zakat barang perdagangan

Zakat *tijarah* –perniagaan/perdagangan merupakan pandangan jumhur ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, dan *fuqaha* berikutnya, tentang wajibnya zakat harta perniagaan, adapun

kalangan *zhahiriyyah* mengatakan tidak ada zakat pada harta perdagangan. Zakat ini adalah pada harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri.

- 4) Zakat temuan (rikaz) dan barang tambang, dasar diwajibkannya zakat pada temuan dan barang tambang yaitu sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang nishabnya sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 20 misqal atau 200 dirham perak dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Adapun untuk barang temuan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20% yang harus disimpan di baitul mal untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.³⁴

5) Zakat hewan

Jika tujuan dari peternakan hewan adalah untuk diperdagangkan, maka ia termasuk dalam bilangan harta perdagangan, namun jika tujuannya adalah untuk diambil susunya dan untuk bekerja serta diberi makan selama setahun (tidak dilepas di tempat penggembalaan), maka mazhab yang mewajibkan untuk dizakati hanyalah mazhab Maliki jika memang sudah mencapai nishab. Sedangkan jika hewan-

³⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern....*, hlm, 29.

hewan tersebut memang untuk ditanakkan dan digembalakan, maka semua sepatat wajib dizakati.

Hewan ternak yang wajib dizakati adalah sapi dengan berbagai jenisnya, kambing dengan berbagai jenisnya dan unta dengan berbagai jenisnya dengan syarat *haul* (sampai setahun) dan sudah mencapai nishab. Nishabnya unta adalah lima, nishabnya sapi adalah tiga puluh, dan nishabnya kambing adalah empat puluh.³⁵

- 6) Zakat perusahaan, adalah zakat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan tertentu. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi.
- 7) Zakat investasi, merupakan zakat terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil investasi.
- 8) Zakat profesi/Zakat penghasilan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, besarnya 2,5%. Namun, di kalangan para ulama masih terdapat pro-kontra mengenai zakat profesi atau penghasilan tersebut.

Adapun syarat-syarat wajib zakat harta adalah sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal

³⁵Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.167

- d) Merdeka
 - e) Miliknya sendiri
 - f) Mencukupi satu nishab sesuai dengan jenis yang akan dikeluarkan zakatnya.
 - g) Telah mencukupi Haul (genap satu tahun qamariyah). Zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta berapa pun jumlahnya, kecuali bila pemiliknya telah genap satu tahun qamariyah.
- c. Zakat harta persekutuan

Zakat persekutuan adalah dua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu milik dua orang yang digabungkan menjadi satu dengan tujuan kerjasama atau lainnya.³⁶

5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Mengenai asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 asnaf, sebagaimana firman Allah swt Qs. at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

³⁶Labib, *Fiqh Islam* ..., hlm.397.

diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³⁷

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Fakir

Yaitu orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut imamiyah dan Maliki orang fakir menurut syara’ adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga selama satu tahun, maka ia wajib di zakati.

Orang fakir menurut Hanafi adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nisab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai nisab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal, alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.³⁸

³⁷Al-Qur’an & Terjemahan, Qs. at-Taubah (9): 60

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali), (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.190

b. Miskin

Menurut Yusuf Qardhawi, miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.³⁹

c. Amil (Panitia)

Yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan adanya “amil zakat” jelas bahwa zakat bukanlah merupakan pekerjaan yang sepenuhnya diserahkan kepada perasaan dan kehendak individu. Akan tetapi zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah atau lembaga mengangkat orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat itu, mulai dari pemungutan, pemeliharaan sampai kepada pembagiannya. Dengan adanya pengurus zakat yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga, diharapkan zakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tujuan meratakan rezeki dan menciptakan keadilan sosial.⁴⁰

d. Mu'allaf

Yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka juga bisa disebut sebagai kaum yang sangat membutuhkan Islam atau kaum yang dibutuhkan oleh Islam.

³⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat, Jilid I* (Beirut: Dr Al-Irsad, 1969), hlm.84

⁴⁰Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf; Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), hlm.79.

e. Hamba sahaya (*riqab*)

Yang dimaksud *riqab* adalah golongan orang-orang yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqab* atau perbudakan.

f. Gharim

Yaitu golongan yang memilih banyak hutang untuk perbuatan bukan maksiat atau menjamin hutang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya, atau orang yang terpaksa hutang karena untuk keperluan hidup dan membebaskan dirinya dari maksiat.

g. Dijalan Allah (*Fii Sabilillah*)

Menurut Yusuf Qardhawi arti asal kata ini ialah amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakwa kepada Allah meliputi segala amal perbuatan shaleh baik yang bersifat pribadi maupun umum. Arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak adalah jihad, sehingga seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya untuk jihad.

h. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) seperti orang-orang yang pergi menuntut ilmu, berdakwah dan lain sebagainya. Ibnu sabil dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanan

dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan kedalam kelompok Ibnu sabil.⁴¹

6. Harta yang wajib dizakati

Harta dalam Bahasa arab disebut *Al-Amw'al* yang merupakan *jama'* atau plural (bentuk mufrad singular, menunjukkan arti banyak). Dalam Qs at-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta umat Islam untuk membesarkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut.

a. Emas, perak dan mata uang

Yang dimaksud adalah emas dan perak, baik yang telah dicetak maupun yang masih batangan, yang telah menjadi milik secara hakiki maupun menurut anggapan hukum. Maksudnya, baik emas dan perak itu digunakan benar-benar sebagai alat tukar-menukar, atau fungsinya digantikan dengan kertas. Dalam hal ini surat-surat berharga yang mempunyai jaminan pasti sebagai alat pembayaran, dianggap sebagai emas dan perak.

Emas dan perak dizakatkan apabila cukup nishabnya (sampai batas yang ditentukan). Nishab emas 20 mitsqal sama dengan 93,6 gram, zakatnya 2,5% (1/40). Sedangkan nishab perak 200 gram dirham sama dengan 634 gram, zakatnya 2,5% (1/40). Jika emas dan perak lebih dari batas minimal nishabnya, maka kelebihan

⁴¹Muhammad Bin Shalih Al-Itsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm.217.

zakatnya diperhitungkan sesuai dengan kelebihan dari batas nishab minimalnya.

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 34-35:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا أَنفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (ayat 34)

Artinya: “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (ayat 35)⁴²

Imam Malik berkata: “Menurut kami, mengenai Sunnah zakat yang sudah tidak diperdebatkan lagi adalah bahwa zakat itu

⁴² Al-Qur'an & Terjemahan, Qs. at-Taubah (9): 34-35

diwajibkan atas harta yang bernilai 20 dinar sama dengan diwajibkan pada 200 dirham”.

Hal-hal yang berkaitan dengan zakat emas dan perak, yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

1) Tidak boleh menggabungkan antara emas dan perak

Hukum menggabungkan emas dan perak agar mencapai nishabnya merupakan sesuatu yang dilarang. Karena, jenis emas jelas berbeda dengan jenis perak. Sebagaimana halnya jenis sapi dan jenis kambing, dimana keduanya sudah mempunyai ukuran zakat masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain.

2) Kewajiban membayar zakat emas dengan nilai perak.

Kewajiban membayar zakat emas dengan nilai perak merupakan pendapat yang tidak mempunyai dalil atau dasar, baik itu dari nash atau ijma' ulama.

3) Mengeluarkan emas dari perak dan perak dari emas.

Imam Malik dan Abu Hanifah berkata: “mengeluarkan unsur dari emas merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan Imam Syafi’I berkata: “bahwa hal itu tidak diperbolehkan”. Pendapat ini sama dengan pendapat Ibnu Hanzm. Pendapat mereka ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW: *“Pada perak itu terdapat zakat sejumlah 1/40 dan pada 200 dirham itu 5 dirham”*.

4) Zakat perhiasan selain emas dan perak.

Para ulama telah bersepakat, bahwa tidak adanya kewajiban zakat atas berlian, intan, aluminium mutiara, marjan dan batu mulia lainnya. Kecuali, jika barang-barang tersebut merupakan aset perniagaan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

5) Zakat perhiasan

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban membayar zakat atas perhiasan yang dikenakan oleh wanita muslim, baik emas maupun perak. Menurut Ibnu Hazm, bahwa perhiasan yang dikenakan diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat atas perhiasan yang dipakai merupakan yang diwajibkan apabila telah melalui masa satu tahun.

Tidak diperbolehkan menggabungkan antara emas dan perak dalam hal pembayaran zakatnya. Juga tidak boleh mengeluarkan zakat hanya salah satu dari keduanya, baik itu perhiasan wanita atau laki-laki. Demikian juga terhadap perhiasan sedang, mushaf dan cincin.

b. Zakat perdagangan

Yang dimaksudkan dengan perdagangan adalah tukar menukar harta untuk memperoleh laba. Perniagaan tidak tertentu dengan satu jenis harta tertentu saja. Jika barang-barang perdagangan

dalam satu tahun ternyata nilainya seharga emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka barang dagangan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

c. Hasil tanaman (buah-buahan dan biji-bijian)

Buah-buahan seperti anggur dan kurma, biji-bijian yang mengenyangkan seperti beras, gandum, jagung yang semisalnya wajib dizakatkan jika mencukupi nishabnya. Zakat buah-buahan dan biji-bijian tidak perlu haul (satu tahun) tetapi dikeluarkannya pada waktu panen.

Mengenai kadar atau jumlah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya itu berbeda-beda kadarnya, tergantung pada bagaimana tanaman tersebut diairi. Untuk tanaman yang diairi (disiram) dari langit (hujan), maka kadar zakatnya adalah persepuluh (10%) dari hasilnya. Sedangkan tanaman yang diairi (disiram) dengan alat siraman, maka kadar zakatnya adalah seperdua (5%).

Allah swt telah mewajibkan umat muslim untuk memberikan zakat atas tumbuh-tumbuhan, hal ini sebagaimana firman-Nya Qs al-Baqarah: 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴³

Peraturan Undang-undang No. 23 tahun 2011 sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 yakni harta yang dikenai zakat meliputi:

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- 2) Uang dan surat-surat berharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa
- 9) Rikaz

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tersebut lebih diperinci, disebutkan mengenai harta wajib zakat salah satunya zakat uang dan surat-surat berharga lainnya, dalam hal ini yang termasuk surat-surat berharga seperti saham, obligasi, *right*, *warrant*, dan sebagainya, termasuk pula surat berharga yang disebut sukuk.

⁴³ Al-Qur'an & Terjemahan, Qs. al-Baqarah (2): 267

Dimana sukuk merupakan surat investasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

7. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat

a. Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah; vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas; horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maalayah ijtihadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Yaitu diantaranya:

- 1) Menyucikan harta dan jiwa muzakki
- 2) Mengangkat derajat fakir miskin
- 3) Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.

- 4) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 5) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
- 6) Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- 7) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
- 8) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- 9) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- 10) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT.
- 11) Berakhlak dengan akhlak Allah.
- 12) Mengobati hati dari cinta dunia.
- 13) Mengembangkan kekayaan batin.
- 14) Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 15) Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT.
- 16) Sarana pemerataan pendapatan untukan mencapai keadilan sosial.
- 17) Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi:
Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan

keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.⁴⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah:

- 1) Tujuan zakat bagi pemberi yakni: zakat mensucikan jiwa, zakat merupakan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, zakat mengembangkan kekayaan batin dan zakat mengembangkan harta.
- 2) Tujuan zakat bagi penerima zakat yakni: zakat membebaskan penerima dari kebutuhan, zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- 3) Tujuan zakat bagi kehidupan sosial masyarakat: menanamkan nilai pendidikan keadilan dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

b. Hikmat dan Manfaat Zakat

Pertama, Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir

⁴⁴Hikmat Kurnia, Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm.8.

dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Rabbul ‘Izatti. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَآئِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading, itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga).”⁴⁵

Kedua, menolong, membantu dan membina kaum *dhu’afa* (orang yang lemah secara ekonomi) maupun *mustahiq* lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran,

⁴⁵ Al-Qur’an & Terjemahan, Qs. Ali-Imran (3): 14

sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memerdulikan mereka.

Ketiga, Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam seperti saran Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai diatas prinsip *ukhuwah Islamiyyah* dan *takaful ijtima'i*.

Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

Keenam, menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa, sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.

Ketujuh, dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin karena terbebas dari

tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.

Kedepalan, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Kesembilan, zakat adalah ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Kesepuluh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir batin.

Kesebelas, menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *umatan wahidah* (umat yang bersatu), *musawah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'I* (sama-sama bertanggung jawab).⁴⁶

⁴⁶*Ibid*, hlm.47-50.

Adapun hikmah zakat menurut Zuhayly secara umum adalah menghilangkan kesenjangan penghasilan dan rezeki mata pencaharian dikalangan masyarakat serta memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin, mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, hal ini merupakan perwujudan rasa syukur atas harta yang telah dititipkan.⁴⁷

B. Investasi sukuk

1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *investment*.

Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.

Kamaruddin Ahmad mengemukakan yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

A. Abdurrahman mengemukakan bahwa investasi mempunyai dua makna, yakni: (1) investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin

⁴⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.37.

modal yang dilekatkan dan memberikan hasil memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. (2) Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi dengan modal berupa uang.⁴⁸

Definisi lainnya di sampaikan oleh Relly & Brown sebagaimana yang dikutip oleh Didik J. Rachbini, menurut mereka investasi adalah komitmen untuk mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa, (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, peranan investasi dalam ekonomi bersifat sangat strategis. Tanpa investasi yang cukup memadai, maka jangan diharap ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Pengertian investasi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁴⁹

⁴⁸Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.183-184

⁴⁹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 ayat (1)

Dalam fiqh Islam, investasi atau simpan dikenal dengan al-Wadi'ah. Menurut Bahasa al-Wadi'ah diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang yang bukan pemiliknya.

Investasi syari'ah adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan atau bisnis yang sesuai dengan syari'ah dengan tujuan mendapatkan keuntungan profit dan keuntungan sosial.

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup hak investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.⁵⁰

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Masalah yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah.

Kebijakan desentralisasi yang telah bergulir di daerah-daerah masih belum menjamin faktor keamanan. Faktor keamanan sejalan

⁵⁰Chaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.10.

dengan desentralisasi itu sendiri masih belum disentuh secara baik oleh pemerintah daerah. Bahkan di beberapa daerah yang telah melakukan desentralisasi secara mendalam, tetapi faktor keamanannya bermutu rendah dan mengalami kekacauan. Hal ini tentu dipandang oleh investor sebagai hambatan dan faktor yang sangat kritis dalam melakukan investasi.

Investasi adalah kelompok masyarakat ekonomi kelas atas yang memiliki dana dan kekayaan jauh lebih banyak dari rata-rata penduduk biasa. Kelompok ini sangat sensitif terhadap keamanan usaha maupun dirinya sehingga sekecil apa pun sudah menjadi penghambat bagi investasi.

- b. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai, seperti sarana transportasi, listrik, air, dan lain-lain juga menghambat perkembangan investasi. Dalam masalah infrastruktur ini, Indonesia dipandang masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini menjadi kendala bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Bagi investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, mereka enggan untuk melakukan ekspansi bisnisnya secara lebih besar lagi sehingga investasi di Indonesia tidak berubah bahkan cenderung mengalami penurunan.
- c. Ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah. Faktor ketidakstabilan mata uang atau nilai tukar rupiah juga menjadi

masalah dalam pengembangan investasi. Selama ini aliran uang yang masuk ke Indonesia adalah aliran uang panas. Uang yang ada di Indonesia bisa cepat keluar masuk sehingga stabilitas nilai tukar mata uang tidak terjamin. Hal ini karena uang yang masuk banyak disalurkan pada pembelian saham yang likuidasinya sangat tinggi. Uang tersebut sangat jarang masuk dalam bentuk pembangunan sektor riil bahkan bisa dibilang tidak ada.

Ketiga faktor tersebut merupakan hambatan yang krusial dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah tidak bisa setengah-setengah dalam melakukan pembenahan ketiga faktor tersebut. Penyelesaian tersebut harus komprehensif sehingga Indonesia bisa memenangkan persaingan dengan negara lain.⁵¹

Islam menganjurkan setiap orang untuk dapat melakukan investasi guna meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, karena dengan berinvestasi seseorang secara tidak langsung telah membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran.⁵²

2. Dasar Hukum Investasi

⁵¹Abdul Manan. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*...., hlm187-188.

⁵²Mardhiyah Hayati, *Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syari'ah: Kajian Terhadap UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014

Islam melarang individu menginvestasikan harta kepemilikannya dengan cara *riba*, *maysir*, *gharar*. Perintah larangan tersebut sudah di jelaskan di dalam al-Qur'an, di antaranya:

- a. Qs. al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵³

Secara legalitas, investasi memiliki dasar hukum yang kuat yakni:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi pemerintah.
- c. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.
- d. Fatwa No.20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi syariah untuk Reksadana Syariah.

3. Pengertian Sukuk

Kata sukuk bentuk jamak dari *sakk* merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru

⁵³ Al-Qur'an & Terjemahan, Qs. al-Baqarah (2): 275

dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan Internasional. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

Sejumlah penulis Barat yang fokus terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyebutkan bahwa “*shakk*” yang merupakan bentuk tunggal dari “*sukuk*” merupakan akar dari kata “*cheque*” dalam Bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi perbankan modern⁵⁴

Mengacu pada Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: 1) Kepemilikan aset berwujud tertentu, 2) Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau 3) Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.⁵⁵

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipersentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima

⁵⁴Burhanuddin. S, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.57.

⁵⁵Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tentang Penerbitan Efek Syariah.

nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan aset yang *tangible*, barang, jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu.

Pada praktiknya sukuk secara umum di identikkan sebagai “obligasi” yang penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan. Seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.⁵⁶

Menurut terminologi sukuk yang dijelaskan oleh para pakar ekonomi, di antaranya ialah:

- a. Berdasarkan pendapat Saiful Azhar Rosly, sukuk ialah nilai atau asset yang berbentuk dokumen atau sertifikat.

⁵⁶Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.140-141

- b. Berdasarkan pendapat Michael J. T. McMillen, sukuk sering dihubungkan sebagai “*Islamic Bonds*”, sukuk berhubungan dengan sertifikat investasi dikarenakan bersifat hak milik. Sukuk mencerminkan suatu proposional atau praktikal terhadap minat kepemilikan dalam suatu asset atau berbagai asset yang bergabung.
- c. Berdasarkan pendapat Mazhab Syafi’I, *hawalah* berhubungan dalam menyelesaikan utang yang dilakukan dalam bentuk dan jumlah serta ukuran yang sama, sedangkan penyelesaian utang yang dilakukan bukan atas dasar pertolongan termasuk dalam kategori riba. Pemahaman fiqh lebih berfokus pada peranan sukuk yang merupakan suatu akad kerja sama terhadap pengambilan keuntungan dari pada objek akad.

Berdasarkan definisi di atas dapat di pahami bahwa sukuk ialah suatu instrumen yang kreatif yang bisa menolong untuk menghimpun dana demi kepentingan umum dalam meningkatkan dan mengembangkan modal usaha.⁵⁷

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana

⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm.176

masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari Institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter.

Sukuk dipersamakan dengan obligasi syariah. Istilah obligasi syariah yang digunakan dalam Fatwa DSN sebenarnya lebih mengikuti opini pasar modal konvensional. Tetapi obligasi syariah dan obligasi konvensional sangat berbeda. Sistem pengembalian pada obligasi syariah adalah bagi hasil, margin, dan *fee*, sedangkan pada obligasi konvensional sistem pengembaliannya adalah sistem bunga. Bunga merupakan perwujudan dari riba sehingga obligasi konvensional haram dimiliki dan diperdagangkan.⁵⁸

Sebagai instrument investasi, sukuk tidak menggunakan basis dasar bunga. Nilai return (tingkat pengembalian) dari sukuk didasarkan atas bagi hasil, hal ini yang membedakan sukuk dengan obligasi konvensional. Perbedaan lain sukuk dengan obligasi konvensional adalah sukuk diterbitkan berdasarkan suatu akad perjanjian dan memerlukan transaksi pendukung berupa *aset rill* (obyek barang) yang mengikutinya (*underling aset*).

Pihak yang terlibat dalam sukuk:

- a. Emiten/Obligor yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo.

⁵⁸Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.48

- b. Investor yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasi masing-masing.
- c. *Underwriter/SPV (Special Purpose Vehicle)* yaitu badan hukum yang didirikan untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: (1) sebagai penerbit sukuk, (2) bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
- d. Shariah Advisor, yaitu sebagai pihak yang memberikan farwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan.
- e. Wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan.

SBSN merupakan instrument investasi yang diterbitkan oleh negara. Penerbitan SBSN merupakan suatu perjanjian antara negara sebagai penerbit dengan investor. Menurut Thol bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya suatu surat berharga antara penerbit dan investor adalah suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum dua pihak, yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu. Mengenai hal bahwa jika pemegang pertama mengalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya maka penerbit tetap terikat di dalam perjanjian.⁵⁹Oleh karena itu selain

⁵⁹Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hlm.47

didasarkan pada suatu transaksi atau akad syariah penerbitan SBSN juga didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dasar Hukum Sukuk

Faktor utama yang melatarbelakangi hadirnya sukuk sebagai salah satu instrument dalam sistem keuangan Islam adalah ketentuan al-Qur'an dan Sunnah yang melarang riba, *maysir*, *gharar*, bertransaksi dengan kegiatan atau produk haram, serta terbebas dari unsur *tadlis*. Obligasi yang dibenarkan oleh syariah adalah obligasi yang tidak bersentuhan dengan unsur ribawi. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan terkait dengan persoalan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Qs. al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁶⁰

⁶⁰ Al-Qur'an & Terjemahan, Qs. al-Maidah (5): 1

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir *Mishbah Al-Uqud* ialah jamak aqd/akad, yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya ialah: salah satu bentuk akad, yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya, dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula yakni penjualnya dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya.⁶¹

- b. Kaidah fiqh yang dikutip merujuk kepada prinsip bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dengan demikian, jual beli *murabahah* adalah akad yang boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang mana pun seperti tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba* dan lain-lain.
- c. Kaidah fiqh yang dikutip merujuk pada ketentuan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim, dapat menarik kemudahan. Artinya, jika memang seorang muslim mengalami kesulitan yang melampaui batas-batas kewajaran untuk melakukan suatu perintah, maka akan ada alternatif lain sehingga akan memudahkan persoalan yang dihadapinya. Terkait dengan obligasi syariah, jika memang dunia keuangan merasa berat dan kesulitan untuk mendapatkan

⁶¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, ...hlm.182

fresh money tanpa adanya obligasi, maka hal itu diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma syariah.⁶²

- d. Peraturan BAPEPAM-LK peraturan No.IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah.
- e. Peraturan BAPEPAM-LK peraturan No.IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.
- f. Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- g. Fatwa DSN-MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- h. Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan murabahah.

5. Macam-macam Sukuk

Menurut AAOIFI (*the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*) terdapat banyak jenis sukuk yang dikenal secara internasional, diantaranya:

- a. Obligasi *Mudharabah*

Menurut Fatwa No: 33/DSN-MUI/IX/2002, yang dimaksud dengan obligasi syariah *mudharabah* adalah obligasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 7/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dengan

⁶²Abdul Manan. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*..., hlm 331-332.

kata lain, istilah obligasi syariah mudharabah dapat diartikan sebagai surat penerbitan kontrak kerjasama untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Emiten dalam obligasi syariah *mudharabah* adalah *mudharib*, sedangkan pemegang obligasi syariah mudharabah adalah *shahibul mal*. Pada tataran praktik, obligasi mudharabah dikeluarkan oleh perusahaan (*mudharib/emiten*) kepada investor (*shahibul maal*) dengan tujuan untuk pendanaan proyek tertentu yang dijalankan perusahaan. Keuntungan nya di distribusikan secara periodik berdasarkan nisbah tertentu yang telah disepakati. Sedangkan apabila terjadi kerugian, resiko akan ditanggung secara bersama sesuai dengan bentuk dan jumlah modal yang disertakan.

Adapun ketentuan dan mekanisme operasional obligasi syariah mudharabah ini dapat diringkaskan dalam butir-butir berikut:

- 1) Kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwali amanatan.
- 2) Resiko atau persentase bagi hasil (*nisbah*) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*).
- 3) Nisbah ini dapat ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah di tetapkan di awal kontrak.

- 4) Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan /keuntungan yang dibagi hasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.
- 5) Pembagian hasil pendapatan ini atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan).
- 6) Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja actual emiten, maka obligasi syariah memberikan *indicative return* tertentu.

b. Obligasi *Ijarah*

Akad *ijarah*, pada prinsipnya terjadi pemindahan manfaat yang bersifat sementara, namun tidak disertai pemindahan kepemilikan. Berdasarkan fatwa No: 41/DSN-MUI/III/2004, ketentuan khusus obligasi syariah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Akad yang digunakan dalam obligasi syariah *ijarah* adalah *ijarah* dengan memperhatikan substansi Fatwa No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
- 2) Sesuai yang menjadi objek *ijarah* harus berupa manfaat yang dibolehkan.

- 3) Jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan mempertimbangkan substansi Fatwa No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksadana Syariah dan No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.
- 4) Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan obligasi syariah *ijarah* baik untuk aset yang telah ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan.
- 5) Pemegang obligasi syariah *ijarah* sebagai pemilik aset atau manfaat dalam menyewakan aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui emiten sebagai wakil.
- 6) Emiten yang bertindak sebagai wakil dari pemegang obligasi syariah *ijarah* dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
- 7) Dalam hal emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
- 8) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DSN atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN-MUI, sejak proses emisi obligasi syariah *ijarah* dimulai.

- 9) Kepemilikan obligasi syariah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

Secara teknis, obligasi syariah *ijarah* dapat dilakukan dengan dua cara:

- a) Emiten dapat bertindak sebagai wakil investor yang berkedudukan sebagai penyewa (*musta'jir*), sedangkan *property owner* sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Dengan demikian, dalam hubungan ini terjadi dua transaksi. Pertama transaksi antara investor dengan emiten, dimana investor mewakilkan dirinya kepada emiten dengan akad wakalah untuk melakukan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) dengan pihak *property owner*. Kedua, transaksi terjadi antara emiten sebagai wakil investor dengan *property owner* sebagai orang yang menyewakan untuk sewa menyewa (*ijarah*)
- b) Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka diterbitkan surat berharga jangka panjang (obligasi syariah *ijarah*). Dengan demikian, dari penerbitan obligasi tersebut, emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa *fee*

serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁶³

c. Sukuk *Musyarakah*

Yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah* yang merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai jumlah partisipasi modal masing-masing.

d. Sukuk *Murabahah*

Yaitu surat berharga yang mewakili obligasi moneter, yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank, tidak dapat menciptakan instrument yang dapat diperjualbelikan. Sementara tagihan *murabahah* tidak dapat mengambil return tertentu, perjanjian mereka juga harus berdasarkan nilai yang tercantum. Sukuk *murabahah* lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik.

e. Sukuk *istishna'*

⁶³Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*,...hlm.143-151

Yaitu suatu bentuk perjanjian jual beli antara para pihak untuk pembiayaan suatu proyek. Adapun cara, jangka waktu, dan harga ditentukan oleh berdasarkan kesepakatan para pihak.

f. Sukuk *salam*

Yaitu kontrak dengan pembayaran harga dimuka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian.

6. Keuntungan Sukuk

Penerbitan obligasi syariah berfungsi sebagai instrument pembiayaan (*financing*) dan sekaligus investasi (*investment*) yang dapat ditawarkan ke dalam berbagai bentuk atau struktur sesuai akad syariah. Berdasarkan jenis akad yang digunakan, bentuk keuntungan penerbitan obligasi syariah dapat dibedakan menjadi dua macam,⁶⁴ yaitu:

- a. Pembagian hasil berdasarkan akad persekutuan yaitu berupa *mudharabah/musyarakah*. Obligasi syariah yang menggunakan akad persekutuan ini akan memberikan keuntungan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing*) antara investor sebagai *shahib al-mal* dengan perusahaan yang menjalankan usaha sebagai *mudharib*. Obligasi jenis ini akan memberikan keuntungan dengan menggunakan *term indicative/expected return* karena sifatnya yang *floating* dan tergantung pada kinerja perusahaan yang dibagi hasilkan.

⁶⁴*Ibid*, hlm.142.

- b. Pembagian *margin/fee* berdasarkan akad pertukaran yaitu *murabahah, salam, istishna dan ijarah*. Dalam fiqh muamalah akad ini bersifat *natural certainty contract*, sehingga obligasi syariah yang menggunakannya akan memberikan hasil yang pasti dan dapat diperkirakan sebelumnya. Dengan kata lain, akad tersebut merupakan bentuk pertukaran dengan skema *cost plus basis*, sehingga akan memberikan keuntungan yang cenderung bersifat tetap.

Untuk kejelasan, DSN-MUI melalui fatwanya sebenarnya mengkategorikan kedua bentuk akad persekutuan dan pertukaran tersebut menjadi tiga jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang obligasi syariah. Pertama, berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi *mudharabah* atau *musyarakah*. Kedua, keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi *murabahah, salam, atau istishna*. Dan ketiga, berupa *fee* (sewa) dari aset yang disewakan untuk pemegang obligasi dengan akad *ijarah*.

7. Karakteristik Sukuk

Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu.
- b. Pendapatan yang di berikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang di gunakan dalam penerbitan.
- c. Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.

- d. Memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan.
- e. Penggunaan *proceedes* harus sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk memperluas hasil sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternative instrument investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.⁶⁵

C. Tinjauan Pustaka

1. Tesis yang disusun oleh Islahuddin Ramadhan Mubarak yang berjudul “Zakat Saham dan Obligasi” (Studi Analisis Istibat Hukum Yusuf Qardhawi). Tesis ini menyimpulkan, jika saham dan obligasi tidak sah menurut syariat dikarenakan berbasis konvensional atau ribawi, atau menyangkut hal yang diharamkan, maka para ulama memiliki 3 pendapat yaitu:
 - a. Tidak wajib dikeluarkan zakat keduanya, baik modal maupun bunga atau hasil yang diperoleh. Dikarenakan mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.

⁶⁵Dede Afdul Fatah, *Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*, Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 1, Januari 2011

- b. Wajib dikeluarkan zakat dari modal keduanya, bukan dari bunga atau hasil yang diperoleh. Karena keduanya termasuk harta produktif.
 - c. Wajib dikeluarkan zakat keduanya, baik modal maupun bunga atau hasil yang diperoleh dengan cara menggabungkan nilai keduanya.⁶⁶Perbedaan dari skripsi yang disusun oleh penulis adalah penulis membahas zakat investasi sukuk menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan tesis yang disusun oleh Islahuddin mengenai zakat saham dan obligasi. Obligasi disini ialah obligasi konvensional yang mengandung unsur riba, sedangkan penulis membahas sukuk. Sukuk yaitu obligasi yang berbasis syariah yang tidak mengandung unsur riba.
2. Skripsi yang disusun oleh Khairul Mahfudz yang berjudul “Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili) menyimpulkan:
- a. Menurut Yusuf Qardhawi kekayaan investasi dikenakan kewajiban zakat meskipun tidak disebutkan dalam nash. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili menganalogikan dengan zakat perdagangan.
 - b. Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili sama-sama menetapkan nisbah dan mewajibkan zakat investasi.⁶⁷

⁶⁶Islahuddin Ramadhan Mubarak “*Zakat Saham dan Obligasi* (Studi Analisis Istibat Hukum Yusuf Al-Qardhawi).” (Tesis Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar 2017)

⁶⁷Khairul Mahfudz “*Zakat Investasi* (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili).” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019)

Perbedaan dari skripsi penulis adalah skripsi yang disusun oleh Khairul Mahfudz hanya membahas zakat investasi berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, tidak menjelaskan mengenai investasi apakah yang dikenakan zakatnya, sedangkan penulis lebih spesifik membahas zakat investasi sukuk menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fadhil yang berjudul “Analisis Performa Sukuk dan Obligasi di Indonesia periode 2014-2017”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara return indeks sukuk dan obligasi. Ditunjukkan dengan nilai probabilitas $>0,05$. Perbedaan dari skripsi penulis adalah skripsi yang disusun oleh Ahmad Fadhil tidak membahas adanya zakat sukuk dan lebih membahas performa sukuk dan obligasi di Ind⁶⁸onesia. Sedangkan disini skripsi yang dibahas oleh penulis lebih membahas akan zakat sukuk itu sendiri,

⁶⁸Ahmad Fadhil “*Analisis Performa Sukuk dan Obligasi di Indonesia periode 2014-2017*” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhammad, *Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013
- Ali Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998
- Alim Nizarul, Muhammad, *Muhasabah Keuangan Islam*, Solo: Aqwam Media Profetika, 2011
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Astawa Pantja, Gede I, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008
- Bahmid, Gasmir, *Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat*, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Dahlan Aziz, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008
- Faniyah, Iyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, Yogyakarta: Deepublis, 2018
- Fatwa No.20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi syariah untuk Reksadana Syariah
- Hafinuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Hasan, Farroh Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Harjono, K Chaniswara, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Hawwa, Said, *Al-Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Hikmat Kurnia, Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008

Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015

Imam Jalaluddin Al-Mahaili, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*, Jilid I, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996

Kansil, T,S,C, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006

Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009

Meolong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakrya, 2006

Mugniyah, Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), Jakarta: Lentera, 2001

Muhammad Bin Shalih Al-Itsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008

Mz, Labib, *Fiqh Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006

Prihatini, Farida, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf; Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi pemerintah

Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tentang Penerbitan Efek Syariah.

POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakat*, Jilid I, Beirut: Dr Al-Irsad, 1969

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UUP AMP

YKPN, 2003

S, Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

S, Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984

Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo, 2015

Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

Tendelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE, 2001

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Jurnal

Fatah, Dede Abdul, *Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*, Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 1, Januari 2011

Fadhil, Ahmad “Analisis Performa Sukuk dan Obligasi di Indonesia periode 2014-2017” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018)

Hayati, Mardhiyah, *Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII No.1, Juni 2004

Indonesia Zakat dan Development Report, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2011

Januardi, *Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Vol I No. 1, November 2018

Mahfudz Khairul “Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili).” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019)

Mubarak Ramadhan, Islahuddin “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi).” (Tesis Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar 2017)

Sumber Online

Rusli, *Zakat Saham & Obligasi*, tersedia di: <http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya/jawab/zakat>.

